



Ahmad Budiman

Analis Legislatif Ahli Madya
ahmad.budiman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah terus mempercepat transformasi digital layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) 2.0. Platform ini menjadi bagian dari strategi *Government Technology* (GovTech) Indonesia untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Platform ini dihadirkan untuk mengatasi persoalan, seperti banyaknya aplikasi dan data yang tersebar, serta sistem yang tidak saling terhubung.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menegaskan MPPDN menjadi bukti transformasi digital yang nyata. Semua layanan dapat terkoneksi, data bisa aman dan prosesnya menjadi lebih sederhana. Kementerian Komdigi memiliki mandat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menyelenggarakan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Mandat itu mencakup pusat data nasional, jaringan intra-pemerintah, hingga sistem penghubung layanan. Kementerian Komdigi tidak hanya menjadi penyedia teknologi, tetapi juga penghubung untuk memastikan semua layanan publik di Indonesia saling terintegrasi. Platform ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara transparan, *real-time* dengan dokumen seragam yang dijamin keabsahannya melalui tanda tangan elektronik. Kementerian Komdigi berperan dalam memelihara serta mengembangkan pembaruan aplikasi MPPDN versi 2.0 dengan menyediakan pusat data nasional, kanal notifikasi, dan layanan bantuan untuk pemerintah daerah.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang GovTech, Luhut Binsar Pandjaitan, pada acara penandatanganan keputusan bersama MPPDN 2.0 di Jakarta Selatan, menyampaikan digitalisasi membuat tata kelola lebih mudah dipantau. Jika syarat lengkap tetapi izin belum disetujui lima hari, sistem otomatis menerbitkan izin. Tidak ada ruang intervensi manual. GovTech akan menjadi penggerak utama sistem pemerintahan digital yang memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan negara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menilai digitalisasi pelayanan publik diharapkan akan mempercepat pelayanan, memangkas berbagai tahapan dalam mendapatkan layanan bagi masyarakat supaya menjadi lebih sederhana, serta dapat diakses melalui berbagai media elektronik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pada acara penandatanganan keputusan bersama penyelenggaraan perizinan tenaga kesehatan melalui MPPDN yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Komdigi, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menilai digitalisasi dan otomatisasi lewat MPPDN membawa perubahan signifikan. Sudah ada 1,8 juta data tenaga kesehatan terintegrasi. Proses izin yang dulu berbelit-belit kini lebih cepat, transparan, dan otomatis. Apabila syaratnya lengkap, maka izin akan terbit maksimal lima hari. Tidak ada lagi celah pungutan liar.

Hadirnya platform MPPD sangat strategis kemanfaatannya, apalagi bila dikaitkan dengan laporan terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bertajuk "Profil Internet

Indonesia 2025", pada semester pertama tahun ini jumlah pengguna internet di Tanah Air telah mencapai 229.428.417 jiwa. Jika melihat data historis APJII, pada 2023 jumlah pengguna internet di Indonesia berada di kisaran 215 juta jiwa. Angka itu kemudian naik sekitar 6 juta menjadi 221,5 juta jiwa pada 2024. Kini, dalam kurun satu tahun terakhir, jumlah pengguna bertambah sekitar 8 juta jiwa, sehingga tembus 229,4 juta pada 2025. APJII juga mencatat bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 80,66 persen. Peningkatan menunjukkan transformasi perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan internet untuk beragam aktivitasnya.

Walaupun demikian, beberapa hal perlu diperhatikan dalam rangka efektivitas penerapan MPPD, yaitu keterjangkauan perangkat dan layanan internet masih menjadi faktor penentu utama dalam memperluas akses digital, literasi digital di masyarakat, serta ketersediaan perangkat masih menjadi tantangan dalam pemerataan akses. Demikian juga dengan keamanan data yang terdapat pada MPPD menjadi faktor penunjang keberhasilan penerapan kebijakan ini.

Atensi DPR

MPPDN 2.0. merupakan platform yang menjadi bagian dari strategi GovTech Indonesia, untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Platform ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara transparan, *real-time* dengan dokumen seragam yang dijamin keabsahannya melalui tanda tangan elektronik. Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat meminta kepada Kementerian Komdigi, untuk memastikan penggunaan platform ini dapat mendatangkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, penerapannya efektif dan efisien, serta keamanan data dimasukkan dalam platform ini terjamin. Selain itu, Komisi I DPR RI juga dapat meminta kepada Kementerian Komdigi untuk terus memutakhirkan teknologi yang digunakan pada platform ini, agar terus sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di masyarakat serta kemajuan teknologi digital. Pemerintah juga harus terus dapat memastikan ketersediaan jaringan internet dan jumlah pengguna internet di masyarakat, agar mampu digunakan oleh masyarakat yang akan menggunakan MPPDN.

Sumber

cloudcomputing.id, 8 Agustus 2025;
cnbcindonesia.com, 9 September 2025;
katadata.co.id, 11 September 2025; dan
komdigi.go.id, 9 September 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra R. Oktaviano
Uilly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making